

Studi Terpercaya

Melacak rantai minyak sawit secara berkelanjutan serta mendefinisikan keberlanjutan yurisdiksi dalam skala besar

Saat ini, konsumen mengandalkan sertifikasi keberlanjutan sebagai cara untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar yang berkelanjutan. Pada sertifikasi keberlanjutan, beban pembuktian ada di bahu penghasil komoditas, termasuk petani dan penghasil skala kecil lainnya. Namun, di banyak negara berkembang, prinsip dan kriteria standar keberlanjutan tidak dapat dicapai karena masalah-masalah sistemik yang hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, seperti alokasi ruang (zonasi) yang menentukan di mana tanaman sawit dapat ditanam secara legal atau ilegal. Lebih jauh lagi, skema sertifikasi keberlanjutan pada prakteknya sering mengesampingkan petani skala kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi biaya sertifikasi keberlanjutan yang tinggi.

Pendekatan yang lebih sederhana, terjangkau, terukur, dan terpercaya diperlukan untuk melengkapi skema sertifikasi, yang tetap merupakan perangkat penting bagi banyak perusahaan serta sebagai sumber inspirasi terhadap praktik terbaik. Transparansi dan kemudahan verifikasi adalah elemen penting dari sistem yang terpercaya. Mengukur kinerja keberlanjutan pada tingkat yurisdiksi, berdasarkan pada beberapa Indikator Kinerja Kunci (KPI) dan sistem lacak rantai pasok, mungkin saja merupakan cara yang lebih sederhana dan lebih murah untuk mengurangi deforestasi dari produksi komoditas pertanian; sekaligus untuk memastikan bahwa petani kecil dan masyarakat adat tidak terabaikan dari rantai pasok komoditas. Berbeda dengan inisiatif tingkat petani dan rantai pasok, kinerja yurisdiksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bekerja bersama dengan sektor agribisnis, kelompok petani, dan masyarakat sipil.

Pendekatan yurisdiksi menggabungkan dan menciptakan sinergi antara otoritas pemerintah dan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah memainkan peran penting. Pemerintah daerah yang terpilih secara demokratis memiliki wewenang serta legitimasi untuk mengeluarkan peraturan dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan. Lebih penting lagi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memantau dan menegakkan hukum pelaksanaan regulasi yang berkelanjutan, yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain.

Kinerja yurisdiksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bekerja bersama dengan agribisnis, kelompok petani dan masyarakat sipil. Di Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik serta mengkoordinasikan pembangunan sosial ekonomi di tingkat daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah terbaru, yang diterbitkan pada tahun 2014, menarik kembali sebagian kewenangan pemerintah dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, terutama yang terkait dengan pengelolaan hutan. Namun, pemerintah kabupaten tetap mempertahankan kewenangannya untuk menetapkan rencana pembangunan pertanian, menerbitkan ijin kepada perusahaan di bidang perkebunan dan memastikan penghasil komoditas, termasuk perusahaan besar dan petani skala kecil, untuk mengelola lahan secara berkelanjutan.



Yurisdiksi adalah wilayah administratif yang menerapkan sistem hukum tertentu. Suatu yurisdiksi biasanya dipimpin oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk memerintah berdasarkan sistem hukum. Peraturan perundangan mengatur mandat dan otoritas dalam perencanaan, penganggaran dan implementasi kebijakan dan program untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut.

Mengenai kajian ini

Kajian, "Melacak minyak sawit secara berkelanjutan serta mendefinisikan keberlanjutan secara yurisdiksi dalam skala besar", sebagaimana yang dimaksud dalam Studi Terpercaya merupakan kolaborasi yang diketuai oleh Lembaga Kehutanan Eropa (European Forestry Institute) dan Inovasi Bumi (INOBU) serta didanai oleh Instrumen Kemitraan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Kata "terpercaya" memberikan makna dapat dipercaya dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan tujuan kajian ini yakni untuk memetakan dan menganalisa pendekatan berbasis yurisdiksi untuk menghasilkan informasi dan analisa yang kredibel sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan dalam diskusi-diskusi mengenai keberlanjutan, perdagangan, dan kerjasama. Sekelompok pemangku kepentingan yang tertarik untuk terlibat akan diundang untuk memberikan masukan selama penelitian.

"Tepercaya" berarti bisa dipercaya dalam bahasa Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengupayakan kabupaten dan provinsi di Indonesia untuk dapat melihat yurisdiksi yang berkelanjutan sebagai jalan untuk mencapai visibilitas dan emdapatkan insentif pasar bagi seluruh masyarakat dan kelompok petani kecil yang terlibat. Oleh karena itu, proyek ini berupaya untuk merancang dan serta menjabarkan sistem yang dapat melacak kemajuan di level yurisdiksi untuk:

- memberikan imbalan kepada kabupatenkabupaten terdepan, dan
- mengajak kabupaten-kabupaten yang dapat mendemonstrasikan perbaikan sebelum mencapai target ambisius dari yurisdiksi berkelanjutan atau sertifikasi yurisdiksi.

Dengan demikian, proyek ini juga diharapkan dapat membantu memperjelas definisi "keberlanjutan yurisdiksi" di Indonesia, serta mengidentifikasi pendekatan yurisdiksi yang dapat direplikasi untuk mencapai keberterimaan dan pengakuan pasar.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada keberlanjutan dalam produksi komoditas pertanian di tingkat kabupaten dan tingkatan lebih tinggi (provinsi dan nasional. Penelitian ini akan memberikan penekanan kepada sektor minyak kelapa sawit yang mana ada permintaan pasar yang tinggi terhadap perbaikan informasi untuk keberlanjutan. Inisiatif ini bermaksud untuk memberikan kontribusi bagi kebijakan terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan termasuk penerapan Nationally Determined Contribution (NDC), serta upaya percepatan sertifikasi kelapa sawit, khususnya melalui ISPO.

Dengan inovasi terbaru, pemrosesan data informasi rantai pasok serta metode visualisasi untuk melacak rantai pasok yang kompleks saat ini dapat dilakukan jauh lebih cepat dan murah dibandingkan yang cara-cara sebelumnya. Kajian ini akan memperoleh manfaat dari kerja sama dengan inisiatif "Transparansi untuk Ekonomi Berkelanjutan" (Trase) yang bekerja untuk membentuk sistem pelacakan yang komprehensif untuk sektor minyak sawit di Indonesia berdasarkan beragam sumber data yang dapat diakses publik. Studi Terpercaya akan menilai sejauh mana informasi yang baru tersebut dapat membantu dalam menyaring peluang pasar, memantau pelaksanaan kebijakan dan regulasi pemerintah dengan biaya yang lebih efektif, sekaligus memberikan visibilitas pasar yang lebih tinggi untuk pelaku rantai pasok lokal.

Jadwal

Penelitian ini akan berlangsung mulai bulan Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada bulan April 2019. Kami mengajak partisipasi semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran selama penelitian. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan penting dapat membantu memastikan relevansi hasil dan rekomendasi penelitian ini.

2018 Maret-April	2018 Juli	2018 Agustus	2018 September-Desember	2019 Januari	2019 Maret
Melaksanakan kajian mendalam untuk membuat daftar kewenangan, peluang, dan tantangan pemerintah daerah secara keberlanjutan	Membuat panduan praktis dan mengidentifikasi kemungkinan indikator keberlanjutan	Menilai kompatibilitas berbagai indikator keberlanjutan dalam konteks Indonesia berdasarkan regulasi yang ada	Melaksanakan wawancara mendalam serta konsultasi untuk meninjau preferensi pemangku kepentingan serta kelayakan indikator	Menguji sejauh mana solusi inovatif untuk melakukan pelacakan (bekerjasama dengan Trase) mampu memberikan informasi rantai pasok yang dapat diandalkan di tingkat kabupaten	Melakukan analisis skenario berdasarkan ukuran dan data yang diusulkan untuk sektor minyak sawit agar dapat memberi informasi kepada pemangku kepentingan mengenai pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai kajian
	Panduan praktis untuk yurisdiksi yang berkelanjutan		Ukuran kemajuan yurisdiksi menuju keberlanjutan		Analisis pasar skenario dan penjelasan teknis

Pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai kajian



- 1. Dalam dua tahun yang akan datang, apakah memungkinkan untuk melacak minyak sawit secara berkelanjutan serta kinerja keberlanjutan yurisdiksi di seluruh Indonesia? Sejauh mana sistem tersebut dapat diandalkan?
- 2. Bisakah kita mencapai konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan tentang indikator terbaik untuk mengukur kinerja yurisdiksi? Apakah indikator-indikator ini dapat diterima dan dianggap tepat untuk melacak keberlanjutan minyak sawit?

Informasi lebih lanjut di info.terpercaya@efi.int

Pernyataan Penyangkalan

Arahan ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan Eropa Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari Instrumen Kemitraan dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Isi dari pengarahan ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

April 2018.





